

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMACETAN PINJAMAN BERGULIR PADA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KOTA GORONTALO

Oleh: Usman

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo

ABSTRAK

Dalam penelitian ini Analisis AHP yang digunakan untuk menemukan skala rasio baik dari perbandingan pasangan yang diskrit maupun kontinyu. Perbandingan ini dapat diambil dari ukuran aktual atau dari suatu skala dasar yang mencerminkan kekuatan perasaan dan preferensi relatif. AHP memiliki perhatian khusus tentang penyimpangan dan konsistensi, pengukuran dan pada ketergantungan di dalam dan di antara kelompok elemen strukturnya. Analisis data yang diuraikan secara internal pada penelitian ini nampak bahwa 30 KSM sebagai sample dan pada umumnya penyebab kredit macet yang ada pada setiap KSM adalah analisis kredit, data keuangan serta pengambilan keputusan. Analisis kredit merupakan penyebab yang paling berpotensi untuk menciptakan kemacetan pinjaman bergulir pada program PNPM Mandiri, dan indikator berikutnya adalah data keuangan yang tidak akurat berpotensi mengakibatkan terjadinya kemacetan pinjaman bergulir serta pengambilan keputusan juga berpotensi untuk menciptakan kemacetan pada kredit macet program PNPM mandiri.

Kata Kunci: *Rate of return, Risk bearing ability, Repayment capacity*

PENDAHULUAN

Memasuki millennium tiga, dunia menunjukkan ciri makin “mengkota” karena setengah dari penduduk yang ada bermukim di kota. Pembangunan telah berperan positif dan negatif terhadap kota. Di suatu sisi banyak fasilitas kota mengalami peningkatan mutu dan jumlah. Di sisi lain, fasilitas yang baik ini adakalanya terpolarisasi hanya melayani kelompok masyarakat tertentu yang berada di lapis atas. Keadaan ini menjadi semakin mengkhawatirkan bila kebijakan kota memang diarahkan terutama untuk pertumbuhan ekonomi seperti yang terjadi di Indonesia dalam dasawarsa sembilan-puluhan hingga dilanda krisis. Di samping itu akibat dari globalisasi yang makin deras, paling sedikit setiap orang mencita-citakan hidup di dunia atau permukiman yang juga akrab lingkungan (*ecoploi*) dan perkotaan (*urbanized*) atau sifat kekotaan yang makin kaya dan bermutu. Yang menjadi tantangan adalah mendekatkan pola kekotaan ini pada masyarakat luas, termasuk dari masyarakat luas.

Urbanisasi yang diartikan sebagai bentuk kehidupan yang bercirikan kota, yaitu dengan berbagai kelebihan berupa fasilitas kota yang bermutu, dihadapkan pula pada banyak kendala seperti keterbatasan lahan yang tersedia dan penduduk yang terkonsentrasi, terkadang sangat tinggi ditempat yang kumuh. Jadi tidak mudah mencapai cita-cita kehidupan yang akrab lingkungan dan berkekotaan sebab sudah ada kerusakan lingkungan yang kompleks di mana-mana dan kemiskinan baik yang laten maupun ad-hoc akibat krisis ekonomi dan keuangan yang melanda Indonesia. Padahal kemiskinan dan kerusakan lingkungan menjadi penghambat pencapaian cita-cita tersebut. Jadi masalah kemiskinan dan permukiman kumuh harus diatasi bersama dengan upaya mengembalikan perputaran ekonomi dan pembangunan yang masih belum berputar kembali.

Akibat krisis banyak kota di Indonesia untuk sementara waktu mengalami keadaan mandeg (*satgnant*). Namun demikian dengan terbentuknya pemerintahan yang lebih diterima masyarakat, roda ekonomi kota mulai menunjukkan gerak berputar kembali. Dalam jangka pendek pembangunan masih diutamakan untuk mendukung pelaksanaan tahap reskonstruksi ekonomi yang diharapkan tidak terlalu lama sudah kembali pada pertumbuhan yang signifikan. Bagi kota masih ada masalah lain yaitu supply properti yang berlebihan akibat dari pola pembangunan yang tidak terarah dari era yang lalu. Bagian yang lebih ini termasuk dalam kelompok yang dipandang dapat merusak lingkungan dan mengambil “hak” dari masyarakat lapis bawah untuk melakukan kegiatannya di kota. Ke depan pembangunan fisik kota harus lebih terkait dengan upaya pemulihan ekonomi dan sekaligus memperbaiki berbagai kerusakan lingkungan yang ada.

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (*social capital*) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat.

Kota Gorontalo yang memiliki penduduk miskin sebanyak 27,4%, penduduk miskin ini juga memperoleh dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan. Penentuan penyaluran dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan kepada Masyarakat atau Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) ditentukan oleh Unit Pengelola Keuangan yang berada di kelurahan. KSM ini membuat rencana dan melaksanakan program masyarakat untuk

menanggulangi kemiskinan di kelurahan masing-masing dengan memanfaatkan dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan. Dana ini merupakan dana bergulir yang dipinjamkan kepada masyarakat dengan tingkat suku bunga sebesar 1,5 – 3% perbulan dari total pinjaman semula dan dana tersebut harus dikembalikan oleh masyarakat. Dari jumlah KSM yang terdapat di Kota Gorontalo ± 4500 KSM. KSM yang memiliki kategori sehat hanya 1,11% dengan tingkat pengembalian dana dari masyarakat sangat rendah yakni rata 28,20 – 56% dari total pinjaman. Diduga banyak faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian dana pinjaman tersebut sehingga mengakibatkan dana bergulir menjadi macet (Auditor PNPM Mandiri, 2008).

Pinjaman Bergulir

Penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan memberdayakan masyarakat melalui tiga jenis usaha pokok yaitu infrastruktur, sosial dan ekonomi yang dikenal dengan Tridaya. Dalam kegiatan ekonomi, diwujudkan dengan kegiatan pinjaman bergulir, yaitu pemberian pinjaman dalam skala mikro kepada masyarakat miskin di wilayah kelurahan atau desa dimana LKM/UPK berada dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Pedoman ini hanya mengatur ketentuan pokok untuk pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir, namun keputusan untuk melaksanakannya diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat setempat (DPU, 2007).

Tujuan Kegiatan Pinjaman Bergulir

Menurut DPU (2007), pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir dalam PNPM Mandiri perkotaan bertujuan untuk menyediakan akses layanan keuangan kepada rumah tangga miskin dengan pinjaman mikro berbasis pasar untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka dan membelajarkan mereka dalam hal mengelola pinjaman dan menggunakannya secara benar.

Meskipun demikian, PNPM bukanlah program keuangan mikro, dan tidak akan pernah menjadi lembaga keuangan mikro. Program keuangan mikro bukan hanya pemberian pinjaman saja akan tetapi jasa keuangan lainnya yang perlu disediakan. Peran PNPM hanya membangun dasar-dasar solusi yang berkelanjutan untuk jasa pinjaman dan non pinjaman di tingkat kelurahan.

PNPM Mandiri Perkotaan dijadikan momen untuk tahap konsolidasi kegiatan keuangan mikro. Oleh sebab itu, dalam tahap ini perlu diciptakan UPK yang kuat, sehat dan secara operasional terpisah dari LKM. Masyarakat sendiri harus terlibat dalam keputusan untuk menentukan masa depan UPK.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemacetan Pinjaman Bergulir

Dalam pemberian kredit biasanya cara yang paling mudah dan ini sering dilakukan oleh bank adalah dengan syarat the five Cs of Credit dan three RS of Credit yakni : Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditions dan Rate of Return, Risk Abiaring, Repayment Capacity.

Sedangkan tiga faktor lainnya, *Rate of return* adalah kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan. Kedua adalah *Risk bearing ability* yang menunjukkan kemampuan menghadapi risiko baik risiko usaha atau bussines risk maupun risiko finansial atau financial risk. Faktor ketiga adalah *Repayment capacity* yang menunjukkan kemampuan untuk membayar kembali utang dan pokok pinjaman. Kemampuan untuk membayar kewajibannya ini dapat dilihat dari tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan. Tingkat keuntungan ini dapat ditingkatkan mungkin dengan meningkatkan penjualan kredit, khususnya untuk barang-barang tahan lama atau durable goods. Praktik semacam ini sangat mudah dijumpai misalnya kredit kendaraan bermotor, mobil, peralatan rumah tangga dan bahkan kredit pemilikan rumah (Sartono, 2001) .

Selain berbagai faktor yang berkaitan dengan kebijakan kredit yang telah dibicarakan sebelumnya, faktor lain yang perlu mendapat perhatian adalah instrument kredit. Dalam kaitannya dengan manajemen piutang terdapat berbagai instrument kredit seperti *open account, promissory note, commercial draft, sight draft, time draft, banker's acceptance, conditional sales contract dan repurchase agreements*.

Pengertian PNPM Mandiri

PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat (DPU, 2007). PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan simultan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai (DPU, 2007).

PEMBAHASAN

Analisis Hasil Penelitian

Dari hasil wawancara dari responden pada KSM di Wonkaditi Timur menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan kemacetan pada PNPM Mandiri secara internal adalah, pemantauan kredit yang buruk, disposisi kredit yang prematur dan data keuangan dan jaminan yang sangat lemah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor internal yang meliputi ; (1) pengambilan keputusan, (2) data keuangan serta (3) analisa kredit yang menyebabkan kemacetan pinjaman bergulir pada PNPM Mandiri. Dari ketiga indikator yang ada dalam faktor internal tersebut masing-masing memiliki pengaruh terhadap kemacetan pinjaman bergulir. Indikator pengambilan keputusan berpotensi mempengaruhi kemacetan kredit dengan bobot 1 dengan skala prioritas 14 %. Skala tersebut menunjukkan bahwa terdapat kontribusi 14 persen yang dapat mempengaruhi kemacetan terhadap pinjaman bergulir PNPM mandiri. Dilihat dari data keuangan memperoleh potensi dalam mempengaruhi kemacetan pinjaman bergulir dengan nilai 2 dengan skala prioritas sebesar 29 persen . Skala tersebut menunjukkan bahwa terdapat persentase kekuatan yang dapat mempengaruhi kemacetan pinjaman bergulir dengan kontribusi 29 %. serta jika ditinjau dari analisa kredit memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kemacetan kredit dengan nilai bobot 4 dengan skala prioritas yang terbesar yakni 57 persen, yang berarti bahwa potensi kekuatan yang dapat menimbulkan kemacetan kredit pinjaman bergulir dengan kontribusi 57 persen. Totalitas penyebab terjadinya kemacetan pada pinjaman bergulir untuk masing-masing indikator sejumlah 100 persen. Jika dilihat dari peringkat indikator atas pengaruh terhadap kemacetan pinjaman bergulir maka nampak bahwa analisis kredit berpeluang 2 kali lebih kuat dibandingkan dengan data keuangan dan jika dibandingkan dengan pengambilan keputusan jauh lebih kuat potensi yang dimiliki untuk mempengaruhi kemacetan pinjaman kredit sebesar 3 kali.

Analisa kredit memiliki jumlah kontribusi terbesar yaitu 57 persen dari keseluruhan faktor yang menjadi penyebab kemacetan pinjaman bergulir yang ada di kelurahan Wongkaditi Timur, artinya bahwa jika analisis kredit yang tidak maksimal sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan maka akan berakibat fatal terhadap pinjaman bergulir PNPM Mandiri, yang berarti bahwa semakin tinggi persentase yang dimiliki item mengenai analisis kredit maka semakin tinggi kemungkinan terjadinya kegagalan dalam mengelola pinjaman bergulir, oleh karena itu diharapkan agar persentasenya bisa diminimalkan. Dilihat dari segi data keuangan nampak bahwa jika pemberian pinjaman tidak didasarkan pada data keuangan akurat yang ada dalam proposal, maka akan berakibat pada peningkatan kemacetan pinjaman bergulir PNPM Mandiri. Semakin tinggi persentase yang dicapai maka semakin tinggi dampak kegagalan yang di derita oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atas pengelolaan dana pinjaman bergulir. Item mengenai pengambilan keputusan memiliki kontribusi sebesar 14 persen yang bermakna bahwa ketidak akuratan dan ketepatan waktu dalam pengambilan keputusan juga akan berakibat fatal dalam pengelolaan dana bergulir yang dipinjamkan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Ini dapat diartikan bahwa semakin kecil persentase kesalahan dalam pengambilan keputusan (decision making) akan berakibat pada pengelolaan dana pinjaman bergulir.

Dari hasil analisis selanjutnya menunjukkan bahwa faktor eksternal yang meliputi ; (1) kegagalan dalam pengelolaan manajemen dan usaha, (2) karakter dan itikat yang buruk (3) penyalagunaan tujuan kredit yang dapat menyebabkan kemacetan pinjaman bergulir pada PNPM Mandiri. Dari ketiga indikator yang ada dalam faktor eksternal tersebut masing-masing memiliki pengaruh terhadap kemacetan pinjaman bergulir. Indikator kegagalan dalam pengelolaan manajemen dan usaha berpotensi mempengaruhi kemacetan kredit dengan bobot 1 dengan skala prioritas 13 %. Dengan Skala tersebut menunjukkan bahwa terdapat kontribusi 13 persen yang dapat mempengaruhi kemacetan terhadap pinjaman bergulir PNPM mandiri. ditinjau dari karakter dan itikat yang buruk menunjukan suatu potensi dalam mempengaruhi kemacetan pinjaman bergulir dengan nilai 2 dengan skala prioritas sebesar 21 persen . Dengan demikian skala tersebut menunjukkan bahwa terdapat persentase kekuatan yang dapat mempengaruhi kemacetan pinjaman bergulir dengan kontribusi 21 %. Jika ditinjau dari penyalagunaan tujuan kredit maka dapat memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kemacetan kredit dengan nilai bobot 4 dengan skala prioritas yang terbesar yakni 66 persen, yang berarti bahwa potensi kekuatan yang dapat menimbulkan kemacetan kredit pinjaman bergulir dengan kontribusi 66 persen. Totalitas penyebab terjadinya kemacetan pada pinjaman bergulir untuk masing-masing indikator sejumlah 100 persen. Jika dilihat dari peringkat indikator atas pengaruh terhadap kemacetan pinjaman bergulir maka nampak bahwa penyalagunaan tujuan kredit berpeluang 2 kali lebih kuat dibandingkan dengan dari faktor karakter dan itikat yang buruk dan jika dibandingkan dengan kegagalan dalam pengelolaan manajemen dan usaha jauh lebih kuat potensi yang dimiliki untuk mempengaruhi kemacetan pinjaman kredit sebesar 2 kali.

Analisa kontribusi persentase yang ada menunjukan, bahwa faktor penyalagunaan tujuan kredit memiliki jumlah kontribusi terbesar , yaitu 66 persen dari keseluruhan faktor yang menjadi penyebab kemacetan pinjaman bergulir yang ada di kelurahan Wongkaditi Timur ,Kontribusi sebesar 21 persen ,menunjukan bahwa faktor karakter dan itikat yang buruk menjadi faktor penyebab terjadinya kemacetan pinjaman bergulir,dari keseluruhan faktor penyebab yang ada ,Kontribusi sebesar 13 persen ,menunjukan bahwa kegagalan dalam pengelolaan manajemen dan usaha,menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kemacetan pinjaman bergulir, walaupun jumlah prioritas hanya kecil,yaitu sebesar 13%.

Konsistensi

Hasil analisis terhadap faktor-faktor yang menyebabkan kemacetan pinjaman bergulir dilihat dari faktor internal yang meliputi (1) analisis kredit, (2) data keuangan serta (3) pengambilan keputusan. Konsistensi dari indikator-indikator menunjukkan bahwa jika terjadi perubahan pada faktor internal tersebut, tidak akan mempengaruhi perubahan pada skala prioritas yang sudah tersusun sejak awal. Oleh karena itu, perubahan indikator-indikator yang ada diharapkan tidak menimbulkan indikator baru terhadap penyebab terjadinya kemacetan pinjaman bergulir pada PNPM Mandiri.

| Faktor Internal Penyebab Kemacetan | PK | DK | AK | Prioritas |
|------------------------------------|----|-----|-----|-----------|
| Pengambilan Keputusan | 1 | 1/2 | 1/4 | 0,14 |
| Data Keuangan | 2 | 1 | 1/2 | 0,29 |
| Analisis Kredit | 4 | 2 | 1 | 0,57 |

Suatu matriks dikatakan konsisten jika $a_{ij}, a_{jk} = a_{ik}$ untuk semua i, j, k . dapat diperhatikan bahwa matriks ini adalah konsisten. Seperti yang telah dibahas yaitu PK, DK = 1/2, karena itu untuk konsisten (PK, AK) - {dimana PK, AK = (PK, DK). (DK, AK) = 1/2 . 1/2 = 1/4} - Harus bernilai 1/4 dan ternyata posisi (PK, AK) memang bernilai 1/4.

Langka berikutnya adalah menentukan skala prioritas (weight). Telah disebutkan bahwa skala ini dapat melalui penyelesaian eigen vector. Kemudian diikuti penyusunan matriks pairwise comparison untuk alternatif-alternatif dalam kaitannya dengan kriteria pada tingkat di atasnya.

Setelah menyelesaikan eigen vector diperoleh vector prioritas: pengambilan keputusan mendapatkan prioritas senilai 0,14 dan data keuangan memperoleh prioritas 0,29 serta 0,57 merupakan prioritas paling tinggi dalam mempengaruhi kemacetan pinjaman bergulir pada PNPM Mandiri.

Suatu pendekatan alternatif yang sederhana untuk memperoleh prioritas ditunjukkan dengan cara matriks pairwise comparison dinormalisasi dengan cara membagi setiap unsur pada setiap kolom dengan jumlah kolom berikut:

| | | | |
|--------|---|-----|-----|
| | 1 | 1/2 | 1/4 |
| | 2 | 1 | 1/4 |
| Jumlah | 4 | 4 | 1 |

Matriks yang di normalisasi

| | | |
|-----|------|-----|
| 1/7 | 1/11 | 1/6 |
| 2/7 | 1/11 | 1/6 |
| 4/7 | 8/11 | 1/6 |

Hasil perhitungan dan normalisasi menunjukkan bahwa analisis kredit yang kurang akurat merupakan kriteria terpenting karena prioritasnya tertinggi yaitu 0,57 diikuti Data Keuangan 0,29 dan pengambilan Keputusan dianggap rendah dengan nilai prioritas 0,14. yang dapat mempengaruhi kemacetan pinjaman bergulir pada PNPM Mandiri dikelurahan wongkaditi Timur Kota Gorontalo.

Setelah dianalisis secara internal dengan focus matriks Comparison maka dilanjutkan dengan Hasil analisis terhadap faktor eksternal yang menyebabkan kemacetan pinjaman bergulir pada PNPM mandiri yang meliputi (1) kegagalan dalam pengelolaan manajemen dan usaha, (2) karakter dan idtikat yang buruk (3) penyalagunaan tujuan kredit. Konsistensi dari indikator-indikator menunjukkan bahwa jika terjadi perubahan pada faktor eksternal tersebut, tidak akan mempengaruhi perubahan pada skala prioritas yang sudah tersusun sejak awal. Oleh sebab itu, perubahan indikator yang ada diharapkan tidak menimbulkan indikator baru terhadap penyebab terjadinya kemacetan pinjaman bergulir pada PNPM Mandiri di wonkaditi Timur kota Gorontalo seperti matriks berikut:

| Faktor eksternal penyebab kemacetan | KPM | KIB | PTK | Prioritas |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----------|
| Kegagalan pengelolaan manajemen | 1 | 1/2 | 1/4 | 0,13 |
| karakter dan idtikat buruk | 2 | 1 | 1/2 | 0,21 |
| penyalagunaan tujuan kredit | 4 | 2 | 1 | 0,66 |

Suatu matriks dikatakan konsisten jika $a_{ij}, a_{jk} = a_{ik}$ untuk semua i, j, k . dapat diperhatikan bahwa matriks ini adalah konsisten. Seperti KPM, $KIB = \frac{1}{2}$, karena itu untuk konsisten (KPM, PTK)- {dimana $KPM, PTK = (KPM, KIB).(KIB, PTK) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ }- Harus bernilai $\frac{1}{4}$ dan ternyata posisi (KPM,PTK) senilai $\frac{1}{4}$.

Langka berikutnya adalah menentukan skala prioritas (weight). Telah disebutkan bahwa skala ini dapat melalui penyelesaian eigen vector. Vector prioritas yang dihasilkan adalah (PK,DK,AK) = (0,14 0,29 0,57) dengan CR = 0. ini berarti karakter dan idtikat buruk dan penyalagunaan tujuan kredit kira-kira dua atau empat kali diprioritaskan dibanding kegagalan pengelolaan manajemen.

Setelah menyelesaikan eigen vector diperoleh vector prioritas (PK,DK,AK) masing menunjukkan 0,14, 0,29 dan 0,57.

Suatu pendekatan alternatif yang sederhana untuk memperoleh prioritas ditunjukkan dengan cara matriks pairwise comparison dinormalisasi dengan cara membagi setiap unsur pada setiap kolom dengan jumlah kolom berikut:

| | | | |
|---|-----|-----|------|
| 1 | 1/2 | 1/4 | 0,14 |
| 2 | 1 | 1/4 | 0,29 |
| 4 | 4 | 1 | 0,57 |

Matriks yang di normalisasi

| | | |
|-----|------|-----|
| 1/7 | 1/11 | 1/6 |
| 2/7 | 1/11 | 1/6 |
| 4/7 | 8/11 | 1/6 |

Hasil perhitungan dan normalisasi menunjukkan bahwa analisis kredit yang kurang akurat merupakan kriteria terpenting karena prioritasnya tertinggi yaitu 0,57 diikuti Data Keuangan 0,29 dan pengambilan keputusan dianggap rendah dengan nilai prioritas 0,14. yang dapat mempengaruhi kemacetan pinjaman bergulir pada PNPM Mandiri dikelurahan wongkaditi Timur Kota Gorontalo.

KESIMPULAN

Setelah dilakukan analisis data yang diuraikan secara internal pada penelitian ini nampak bahwa 30 KSM sebagai sample dari penelitian ini nampak bahwa pada umumnya penyebab kredit macet yang ada pada setiap KSM adalah ; (1) analisis kredit, (2) data keuangan, serta (3) pengambilan keputusan.

Analisis kredit merupakan penyebab yang paling berpotensi untuk menciptakan kemacetan pinjaman bergulir pada program PNPM Mandiri, dan indikator berikutnya adalah data keuangan yang tidak akurat berpotensi mengakibatkan terjadinya kemacetan pinjaman bergulir serta pengambilan keputusan juga berpotensi untuk menciptakan kemacetan pada kredit macet program PNPM mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Auditor PNPM Mandiri, 2008. Laporan Audit Independen PNPM Mandiri Kota Gorontalo.
- Discussion Forum, 2009. Explore Your Brain, Sedikit analisis dari kejahatan perbankan : kriminalitas kredit macet. <http://exploreyourbrain.com/forum/viewthread.php>. akses 06 Mei 2009.
- DPU, 2007. Pedoman Umum : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Jakarta. Departemen Pekerjaan Umum.
- Mulyono, S. 2006. Riset Operasi. Jakarta. UI Press.
- Riduwan dan E.A. Kuncoro. 2007. Cara Menggunakan dan Memakai Analisis Jalur. Bandung. Alfabeta.
- Sartono, A. 2001. Manajemen Keuangan : Teori dan Aplikasi. Ed.4. Yogyakarta. BPFE UGM.
- Thomas L. Saaty.1993. Decision making for Leaders. Jakarta.Binaman Pressindo
- Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. 2000. Indonesia: Strategi Baru Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta : BKPK
- Bappenas. 2004. Indonesia : Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals). Jakarta : Bappenas-UNDP
- Bappenas. 2004. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Jakarta : Bappenas
- Bappenas-PSDA. 2002. Pengelolaan Sumber Daya Alam Dengan Strategi Kemitraan: Naskah Kebijakan. Jakarta : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Tim Inti Applied Policy Development Training (DPAII-SP85) BAPPENAS-CIDA
- Bappenas. 2004. PPA Partisipatory Poverty Assesment. Jakarta : Bappenas – KIKIS
- Bappenas. 2002. Naskah Kebijakan Pengelolaan SDA dengan Strategi Kemitraan. Jakarta : Bappenas
- BPS. Bappenas dan UNDP. 2004. Indonesia Laporan Pembangunan 2004: Ekonomi Dari Demokrasi. Membiayai Pembangunan Manusia Indonesia. Jakarta : BPS – Bappenas - UNDP Indonesia.